



Dampak Etika Konfusianisme Baru dalam Strategi Politik Global Tiongkok Pasca Perang Dingin

Febriansyah Pratama Putra¹, Fikryansyah², Fajriudin³

¹ Fakultas Falsafah dan Peradaban, Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia,
febryanmiddleton97@gmail.com

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia,
Fikryansyahp@gmail.com

³ Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, bandung, Indonesia,
febryanmiddleton97@gmail.com

Corresponding Author: febryanmiddleton97@gmail.com

Abstract: The purpose of this paper is to review and analyse the character of Chinese international politics from the perspective of New Confucian Ethics through the study of Chinese international politics. The purpose of this discussion is to provide insight into the moral foundation of Chinese international politics. and to explain the role of ethics in shaping international political behavior which can have implications for political leadership and decision-making. This study can be a contribution to the development of a nuanced understanding of the complex relationship between ethics, politics and culture in China. The research method applied is a qualitative method with primary data collection techniques from speech manuscript archives and secondary data collection techniques from books and scientific papers, such as theses and journals. The results of the study show that New Confucianism is a representation of the dialectical process that bridges two contradictions between traditional and classical conservative. From the combination of the two, the application of New Confucianism in viewing the ideology, movement and system of Chinese international politics. China with the New Confucian political movement through the efforts of intellectual and elite groups emphasize the importance of rebuilding its characteristics and asserting it to the international community is through the use of soft power.

Keyword: New Confucianism, International Politics, China.

Abstrak: Tujuan makalah ini adalah untuk meninjau dan menganalisis karakter politik internasional Tiongkok dari perspektif Etika Konfusianisme Baru melalui studi tentang politik internasional Tiongkok. Tujuan pembahasan ini adalah untuk memberikan wawasan tentang landasan moral politik internasional Tiongkok dan menjelaskan peran etika dalam membentuk perilaku politik internasional yang dapat memiliki implikasi bagi kepemimpinan politik dan pengambilan keputusan. Studi ini dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan kompleks antara etika, politik, dan budaya di Tiongkok. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer dari arsip naskah pidato dan teknik pengumpulan data sekunder dari buku dan karya ilmiah, seperti tesis dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konfusianisme Baru merupakan representasi dari proses dialektis yang menjembatani dua kontradiksi antara tradisional dan konservatif klasik. Dari kombinasi kedua hal tersebut, penerapan Neo-Konfusianisme dalam memandang ideologi, gerakan, dan sistem politik internasional China. China dengan gerakan politik Neo-Konfusianisme melalui upaya kelompok intelektual dan elit menekankan pentingnya membangun kembali karakteristiknya dan menegaskannya kepada komunitas internasional melalui penggunaan soft power.

Kata kunci: Neo-Konfusianisme, Politik Internasional, China.

PENDAHULUAN

Etika Konfusianisme Baru atau Neo-Konfusianisme merupakan etika filosofis dan politik pembaharuan yang kompleks dari ajaran Konfusianisme, Taoisme dan Buddhisme. Konfusianisme Baru juga mengadopsi nilai-nilai pembaharuan barat yang memuat nilai-nilai etika yang telah dimodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman.

Konfusianisme diperkenalkan oleh Konfusius atau Kong Zi. Dia lahir dengan nama Kong Qiu atau Khiu yang memiliki arti bukit di Kota Tsou pada 551-479 SM. Etika Konfusianisme Baru memuat banyak ajaran yang telah mempengaruhi konteks dan karakter sosio-politik di Asia Timur, khususnya Tiongkok. Konfusianisme Baru telah mewarisi lima etika dasar dalam filosofi politik, yang mencakup hubungan antara raja dan rakyat, hubungan antara ayah dan anak, hubungan antara suami dan istri, hubungan antara sesepuh dan yang lebih muda, serta hubungan antar teman.

Perkembangan etika Konfusiunisme Baru di Tiongkok menjadi fokus penelitian. Hal tersebut sangat menarik untuk diteliti karena bagaimana lima ajaran pokok tersebut sangat beragam dan universal (M. Zinus, 2024), di antaranya *Ren* (仁) yang diartikan sebagai kemanusiaan, *Li* (礼) yang diartikan sebagai ritual, *Xiao* (孝) yang diartikan sebagai bakti, *Yi* (义) yang diartikan sebagai kebenaran atau keadilan dan *Xin* (信) yang diartikan sebagai intergritas dan loyalitas.

Tiongkok sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya Konfusianisme Baru menjadikannya sebagai sendi dalam nilai-nilai dasar politik internasional dan kebijakan luar negeri Tiongkok. Pada masa Presiden Jiang Zemin bersama Menteri Luar Negeri Qian Qichen mengenalkan lima prinsip dasar hubungan luar negeri yang dikenal sebagai *Five Principles of Peaceful Coexistence* (lima prinsip ko-eksistensi damai). Lima prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai Konfusianisme terhadap harmonisasi, stabilitas dan saling menghormati yang merupakan kunci dalam menjaga hubungan antarnegara. Prinsip-prinsip tersebut meliputi penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah, serta prinsip non-agresi dan non-intervensi dalam urusan internal negara lain. Selain itu, terdapat juga komitmen terhadap kesetaraan, saling menguntungkan, dan kerja sama yang damai (Rivai, Aspin Nur Arifin).

Presiden Jiang Zemin juga memperkenalkan *16 Characters Formula*, di dalamnya mengandung empat elemen utama yang menjadi pedoman dalam melakukan modernisasi ekonomi dan pembangunan sosial di Tiongkok. Empat elemen milik Jiang Zemin memiliki pendekatan yang pragmatis dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk ekonomi dan politik. Elemen tersebut di antaranya: **发展经济** (*Fāzhǎn jīngjì*) yang berarti kembangkan ekonomi atau produktivitas, **提高生活水平** (*Tígāo shēnghuó shuǐpíng*) yang berarti tingkatkan kualitas hidup atau kesejahteraan, **维护社会稳定** (*Wéihù shèhuì wěndìng*) yang berarti menjaga stabilitas sosial dan **加强民族团结** (*Jiāqíáng mínzú tuánjié*) atau tingkatkan persatuan nasional atau kekuatan negara.

Artikel ini dibagi menjadi empat bagian yang saling terkait. Bagian pertama adalah pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar. Pada bagian kedua, penulis menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam kajian ini. Selanjutnya, bagian ketiga membahas etika Konfusianisme Baru dan pengaruhnya terhadap politik luar negeri Tiongkok, termasuk kebijakan luar negeri negara tersebut. Terakhir, bagian keempat menyajikan kesimpulan, di mana penulis secara ringkas menganalisis peristiwa-peristiwa penting yang menjadi dasar dalam merumuskan pengaruh etika Konfusianisme Baru terhadap politik luar negeri. Dalam sub-pembahasan, penulis memfokuskan pada tiga aspek: pertama, sejarah etika Konfusianisme Baru; kedua, politik luar negeri Tiongkok pada era Presiden Jiang Zemin; dan ketiga, pengaruh etika Konfusianisme Baru terhadap politik luar negeri Tiongkok.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tentang pengaruh Etika Konfusiunisme Baru terhadap karakter politik di Tiongkok dengan menggunakan perspektif historis dan perspektif politik. Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang suatu fenomena melalui tiga tahap penelitian, yaitu deskripsi, kategorisasi

dan keterkaitan. Tahap deskripsi dilakukan dengan mendeskripsikan temuan penelitian. Selanjutnya, informasi tersebut direduksi untuk menentukan klasifikasi data sebagai data primer, sekunder dan tersier. Untuk memahami fokus penelitian, peneliti membangun koneksi dengan membuat keterkaitan antar kategori (Sugiyono, 2021).

Selanjutnya, peneliti menganalisis data secara sistematis dengan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau pemaparan terhadap subjek dan objek penelitian. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya. Sedangkan metode kualitatif artinya peneliti hanya menganalisis terhadap data atau bahan-bahan yang relevan dan berkualitas (Achmad, Mukti Fajar ND dan Yulianto, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A) Sejarah Konfusianisme Baru

Konfusianisme diperkenalkan oleh Konfusius atau Kong Zi. Dia lahir dengan nama Kong Qiu atau Khiu yang memiliki arti bukit di Kota Tsou pada 551-479 SM. Leluhurnya ialah K'ung Fangshu yang merupakan generasi kesembilan dari raja muda Negeri Sung dan generasi keempat sebelum Konfusius. Turunan keempat generasi sebelum Konfusius ialah Fangshu, Pohsia, Siong-Liang Hut dan Kong Qiu atau Konfusius (Ali M. Imron, 2023). Ibu dari Konfusius merupakan seorang selir dari Kerajaan Yen. Konfusius merupakan anak bungsu dari 11 bersaudara, dimana dia memiliki 9 kakak perempuan dan satu kakak laki-laki yang bernama Bing Phi.

Konfusius dibesarkan di Negeri Lu yang pada saat ini menjadi Provinsi Shandong. Ayahnya meninggal ketika dia berusia 3 tahun dan dimakamkan di Fangshan. Jiwa kepemimpinan serta minatnya terhadap agama telah terlihat, dimana dia mulai memimpin teman-temannya dalam upacara sembahyang. Dia menempuh pendidikan formal di perguruan Yan Ping Tiong. Pada usia 24 tahun, ibunya meninggal dan dimakamkan di Gunung Hong. Setelah selesai berkabung, dia pun memutuskan untuk membuka perguruan dan mulai menerima murid (Ikhsan, Tanggok, 2010). Kecerdasan dan kebijaksanaan yang telah dia miliki mulai menyebar di kalangan masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang sengaja mengunjunginya meski hanya bertukar pikiran terhadap suatu permasalahan (Joesoef, Sou'yib, 1996).

Konfusius belajar musik dari Guru Su Siang, seorang maestro terkenal di bidangnya. Pada usia 29 tahun, ia bersama dua muridnya, Lam-Kiong King Siok dan Bing I Chu, berangkat ke negeri Zhou untuk mendalami ilmu kesusilaan dan peradaban dari Dinasti Zhou. (Ali M. Imron, 2023). Di Negeri Zhou ini, Konfusius bertemu dengan para filsuf ternama yang mempopulerkan ajaran Tao, Lao Tzu dan Guru Tiang Hong sebagai guru musik.

Pada usia 34 tahun, Konfusius memiliki lebih dari 3.000 orang murid. Murid-murid tersebut berdatangan dari seluruh Negeri Lu, baik dari dalam maupun luar. Pada usia 50 tahun, Konfusius aktif dalam dunia pemerintahan, menjabat sebagai Menteri Kehakiman sekaligus menempati posisi sebagai Perdana Menteri di Negeri Lu. Tidak lama berada dalam pemerintahan, Konfusius memutuskan untuk berhenti dari jabatannya dan meninggalkan Negeri Lu. Setelahnya, dia mengembara ke berbagai wilayah Negeri Tiongkok dan menyebarkan ajarannya.

Di usia 60 tahun, Konfusius pulang ke kampung halamannya dan mengabdikan dirinya untuk ilmu pengetahuan serta pendidikan. Dalam menghadapi permasalahan yang ada, Konfusius selalu menghubungkannya dengan takdir, kebaikan dan kebijakan. Konfusius menggunakan metode memberi contoh, teladan dengan mempraktikkan prinsip-prinsipnya, berusaha untuk menjadi sosok yang baik bagi para muridnya. Dedikasinya inilah yang membuat generasi murid-murid berikutnya sangat terinspirasi oleh nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kerendahan hati, kesantunan, kesetiaan kepada negara, dan kepedulian terhadap sesama.

Konfusius mulai menuliskan perjalannya dan saat wafatnya, dia mewariskannya kepada muridnya dalam karya monumentalnya yang berjudul *The Analects of Confucius* (John Eugene Ho, 1993). Dalam politik, Konfusius bertujuan untuk mengembalikan sistem ritual klasik pada masyarakat. Poin-poin ajarannya terletak pada etika, keseimbangan (*doctrine of mean*) dan kebijakan yang baik (*benevolence policy*). Konfusius memandang etika sebagai landasan hubungan antarmanusia dan hubungan sosial.

Dalam perkembangannya, Konfusianisme mengalami pasang surut. Perkembangan tersebut dapat dilihat melalui lima periodisasi besar (Istiqomah, Citra, 2014). Periode pertama ditandai dengan berdirinya Neo-Konfusianisme pada abad ke-9 hingga 10. Tokoh-tokoh tersebut di antaranya Chu Tun I, Chang Tsai, Cheng Hao dan Cheng I (Michael. C. Kalton, 2002). Periode kedua di era Dinasti Song pada tahun 1714. Pada era tersebut, Neo-Konfusianisme mengalami

masa kejayaannya, terlihat pada penyebarannya di luar Tiongkok seperti Jepang dan Korea serta ditandai dengan mulai dipublikasikannya buku yang berjudul *The Complete Books of Master Zhu Xi*. Periode ketiga pada tahun 1911, di mana Neo-Konfusianisme mulai mengalami kemunduran hingga munculnya Konfusianisme Baru. Kemundurannya disebabkan oleh pemberontakan terhadap Dinasti Qing yang berimbang pada perubahan sistem imperial atau kekaisaran menjadi sistem republik sosialis di Tiongkok. Perubahan tersebut menimbulkan gejolak yang sangat kuat pada Neo-Konfusianisme sebagai falsafah dan etika politik yang terletak pada raja maupun kaisar. Periode keempat terjadi pasca Perang Dingin yang dimulai pada tahun 1990. Perjalanan Konfusianisme Baru mengalami masa pasang surut yang disebabkan oleh diskursus terhadap interaksi Timur dan Barat. Diskursus tersebut terkait dengan dampak-dampak ideologis dari dua kubu besar dunia, yaitu Uni Soviet dengan sosialisme-komunis dan Amerika Serikat dengan liberalisme-kapitalisme. Hal tersebut menjadikannya Asia Timur, khususnya Tiongkok menjadi area terdampak pada Perang Dingin berlangsung. Periode kelima pada tahun 1997-1998 atau pasca krisis finansial Asia ditandai dengan pemaknaan Konfusianisme Baru. Di Tiongkok Konfusianisme Baru tidak hanya sebagai model interaksi Timur dan Barat secara ideologi-normatif, tetapi secara praktikal dalam lingkup sistem dan pergerakan politik.

Terdapat lima ajaran maupun nilai-nilai yang diajarkan oleh Konfusius. Kelima ajaran maupun nilai-nilai tersebut sangat beragam dan universal (M. Zunus, 2024), di antaranya *Ren* (仁) yang diartikan sebagai kemanusiaan, *Li* (礼) yang diartikan sebagai ritual, *Xiao* (孝) yang diartikan sebagai bakti, *Yi* (义) yang diartikan sebagai kebenaran atau keadilan dan *Xin* (信) yang diartikan sebagai integritas dan loyalitas.

John Eugene Ho menyebutkan, bahwa terdapat sepuluh inti ajaran Konfusius. *Pertama*, pengembangan moral diri melalui konsep bakti dan loyalitas. *Kedua*, keluarga yang baik bersandar pada konsep bakti antara suami pada istri dan anak pada orang tua. *Ketiga*, konsep ketuhanan dan persatuan atau unifikasi. *Keempat*, keseimbangan atau harmonisasi (*doctrine of the mean*). *Kelima*, kebijakan yang bersarar pada nilai kebaikan. *Keenam*, konsep pendidikan, pembelajaran dan kerja keras. *Ketujuh*, memilih mitra atau teman yang baik. *Kedelapan*, sedikit berkata karena orang yang banyak bicara tanpa tindakan sepatutnya merasa malu. *Kesembilan*, terdapat dua jenjang manusia di bumi, yaitu orang baik yang bermoral dan orang jahat yang mementingkan kekayaan dan jabatan dibanding moralitas. *Kesepuluh*, terdapat dua hal yang sia-sia di bumi, yaitu berbicara atau bersenang-senang sepanjang waktu tanpa memikirkan kebaikan dan bersantap sepanjang waktu tanpa menggunakan akal untuk berpikir (Ho, 1993).

Konfusianisme Klasik menyebar ke wilayah Asia Timur pada abad ke-16 melalui pergerakan intelektual yang dikenal sebagai Neo-Konfusianisme. Neo-Konfusianisme mengalami kebangkitannya sebagai gerakan pada awal abad ke-20 yang mulai di tengah pergolakan politik-militer yang disebut sebagai Konfusianisme Baru (*New Confucianism*). Konfusianisme Klasik merupakan sistem ajaran yang dikembangkan oleh Kongzi yang berfokus pada etika, moralitas dan konsep *Junzi* (Afat, 2024). Neo-Konfusianisme merupakan fusi ajaran Konfusianisme Klasik dengan ajaran-ajaran timur, seperti Buddhisme dan Taoisme yang kemudian dipopulerkan oleh kalangan pelajar. Tokoh-tokoh dari Neo-Konfusianisme yaitu Cheng Hao (1032-1085), Cheng I (1033-1107), Zhu Xi (1130-1209) dan Wang Yangming (1472-1529). Sedang Konfusianisme Baru merupakan fusi dari pemikiran-pemikiran ajaran Neo-Konfusianisme sebagai representasi nilai timur dengan pemikiran-pemikiran modern dari barat. Pemikiran Konfusianisme Baru berfokus pada nilai kemanusiaan yang menitikberatkan hubungan antara manusia dengan alam dan ciptaannya, yang kemudian perhatiannya diperluas pada interaksi antarmanusia dalam konteks hubungan di era modern, perkembangan intelektual, ilmu pengetahuan dan demokrasi. Konfusianisme Baru berupaya untuk menyelaraskan nilai timur dan barat dengan membangun serta mengelaborasi kompleksitas ide-ide konvensional menjadi sebuah representasi baru yang lebih kreatif dan inovatif dalam menjawab tantangan global di era modern (Riuchang Wang, 2011).

B) Politik Luar Negeri Tiongkok

Pada masa kepemimpinan Presiden Deng Xiaoping, Tiongkok mengalami perubahan besar pada arah politik domestik serta politik internasional. Hal tersebut dilakukan dengan mengambil pendekatan yang pragmatis serta mengesampingkan fanatismenya. Presiden Deng Xiaoping dan pemimpin Tiongkok tidak menerima pembangkangan terhadap partai dan negara. Sehingga terjadi peristiwa Tiananmen yang menuntut demokratisasi dan kebebasan.

Setelah peristiwa Tiananmen, Presiden Deng Xiaoping mengundurkan diri dari posisinya sebagai pemimpin tertinggi dan digantikan oleh Jiang Zemin. Jiang Zemin menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis dan Ketua Komisi Militer Pusat. Ia dikenal karena gagasannya tentang ko-eksistensi damai dalam hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Jiang menyadari bahwa menjalin hubungan bilateral yang baik dengan Amerika Serikat merupakan kunci bagi Tiongkok dalam proses modernisasi ekonominya. Gagasan ini kemudian dikenal dengan istilah Formula 16 Karakter. (Zhao, 2014).

Jiang Zemin bersama Menteri Luar Negeri Qian Qichen mengenalkan lima prinsip dasar hubungan luar negeri yang dikenal sebagai *Five Principles of Peaceful Coexistence* (lima prinsip ko-eksistensi damai). Lima prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai Konfusianisme terhadap harmonisasi, stabilitas dan saling menghormati sebagai kunci dalam menjaga hubungan antarnegara. Prinsip-prinsip tersebut mencakup penghormatan pada kedaulatan dan integritas teritori, non-agresi, non-intervensi terhadap urusan internal negara lain, kesetaraan dan saling menguntungkan dan kerja sama yang damai (Rivai, Aspin Nur Arifin, 2022).

Jiang Zemin memperkenalkan *16 Characters Formula*, di dalamnya mengandung empat elemen utama yang menjadi pedoman dalam melakukan modernisasi ekonomi dan pembangunan sosial di Tiongkok. Empat elemen Jiang Zemin memiliki pendekatan yang pragmatis dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk ekonomi dan politik. Elemen tersebut di antaranya: **发展经济** (*Fāzhǎn jīngjì*) yang berarti kembangkan ekonomi atau produktivitas, **提高生活水平** (*Tígāo shēnghuó shuǐpíng*) yang berarti tingkatkan kualitas hidup atau kesejahteraan, **维护社会稳定** (*Wéihù shèhuì wěndìng*) yang berarti menjaga stabilitas sosial dan **加强民族团结** (*jiāqíáng mǐnzu tuánjié*) yang berarti tingkatkan persatuan nasional atau kekuatan negara.

Pada peristiwa Tiananmen, Tiongkok memberikan respon koersi yang menyebabkan kematian terhadap sejumlah demonstran. Sehingga memberikan dampak buruk terhadap hubungan Tiongkok dengan negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat sebagai negara demokrasi dan menjunjung kebebasan sipil. Sebagai respon baliknya, Amerika Serikat secara eksplisit mengecam tanggapan, menghentikan kontak dan menerapkan sanksi ekonomi. Amerika Serikat telah memenuhi tuntutan demonstran dengan membebaskan tahanan-tahanan politik dan melakukan demokratisasi (Qingguo, J, 2005). Setelah respon balik Amerika Serikat terhadap Tiongkok yang menyebabkan ketidakpastian, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kedua negara tersebut (Suettinger, R. L. 2003).

Pemerintah Tiongkok terdesak dengan tekanan dua arah, yaitu barat dan dalam negeri. Sehingga pemerintah Tiongkok memutuskan untuk tidak memenuhi tuntutan dari negara-negara barat. Akan tetapi, penolakan ini tidak termasuk pada hubungan kerja sama antara Tiongkok dan Barat. Pemerintah Tiongkok fokus untuk menhadapi tekanan dari dalam negeri dengan melakukan konsolidasi domestik. Di samping itu, pemerintah juga menggunakan langkah-langkah strategis yaitu *restraint* (menahan diri) yang bertujuan untuk menghindari langkah-langkah yang menyebabkan memprovokasi dan meningkatkan ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat (Qingguo, J, 2005).

Jiang Zemin sebagai presiden menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan Taiwan. Hal tersebut membuktikan bahwa Tiongkok telah mengambil kebijakan yang tegas terhadap kedaulatannya yang tidak dapat diganggu. Tiongkok menolak atas kemerdekaan Taiwan serta penekanan terhadap implementasi *one country, two system* (satu negara, dua sistem) pada Taiwan. Selain itu, penolakan juga terlihat pada tahun 1995-1996 terjadi uji coba rudal di Selat Taiwan (Bush, R. 2005). Secara tersirat Tiongkok mengingatkan pada dunia tidak ingin adanya intervensi asing terhadap Taiwan. Meskipun Tiongkok tetap mendorong adanya dialog untuk menyelesaikan ketegangannya.

Peristiwa pengeboman Kedutaan Besar Tiongkok oleh Pasukan NATO yang dipimpin Amerika Serikat. Pada Perang Kosovo di tahun 1999 menjadikan hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat kembali memanas. Para pemimpin Tiongkok merespon peristiwa tersebut sebagai bentuk kesengajaan, mengingat Amerika Serikat merupakan negara dengan kapasitas militer terkuat di dunia (Kurth, J, 2001). Serangan bom mempengaruhi kebijakan luar negeri yang dikenal sebagai "zaman peluang emas". Kebijakan luar negeri yang sesuai dengan konsep "perdamaian dan pembangunan" tidak menjamin keamanan nasional Tiongkok (Medeiros, E. S. 2009).

Dalam aspek ekonomi, pada awal masa Presiden Jiang Zemin melanjutkan kebijakan keterbukaan ekonomi (Pradana, Muhammad Erza, 2022). Pada dasarnya, pemerintah sangat berhati-hati dalam menghadapi keterbukaan yang luas dan memberikan kebebasan terhadap keluar dan masuknya dana asing. Kewaspadaan tersebut bertujuan untuk menjadi stabilitas ekonomi dalam negerinya (Jacques, M, 2009). Sepanjang tahun 1990-an, Tiongkok membangun iklim persaingan yang ketat dengan menghapuskan tarif dan mengizinkan investasi asing. Perubahan iklim kebijakan ini membawa dampak positif, yang terlihat jelas saat Tiongkok bergabung dengan *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 2001. Dalam keanggotaan WTO merupakan langkah signifikan dalam proses modernisasi dan tonggak Tiongkok untuk berperan lebih aktif dalam ekonomi politik internasional.

C) Pengaruh Konfusianisme Baru terhadap Politik Luar Negeri Tiongkok

a) Konfusianisme Baru sebagai ideologi

Konfusianisme melalui proses panjang sebelum menjadi dasar politik dan sosial di Tiongkok. Konfusianisme sebagai ideologi politik berlaku pada tatanan politik yang nyata dan sebagai cita-cita yang hendak dicapai oleh masyarakat. Ideologi politik merupakan sebuah sistem kepercayaan yang menerangkan serta membenarkan sebuah tatanan politik yang telah ada.

Menurut Sastrapragedja, ideologi dapat diartikan sebagai sekumpulan gagasan atau pemikiran yang diarahkan pada tindakan dan terstruktur dalam sebuah sistem yang teratur (Sastrapragedja, M, 2001). Terdapat lima unsur dasar dalam sistem ini, yaitu deskripsi, analisis, preskripsi, moral, preskripsi teknis serta penolakan. Melalui unsur-unsur tersebut, kita dapat memahami sebuah gagasan secara komprehensif, disertai dengan penafsiran tertentu mengenai fakta sejarah yang digunakan untuk menganalisis fenomena serta merumuskan nilai, cita-cita, dan tujuan serta cara untuk mencapainya (Sastrapragedja, M, 2001).

Di era Mao Zedong ketika reformasi kebudayaan dicetuskan, termasuk juga penghapusan nilai-nilai dan sistem feudalisme. Maka Konfusianisme dianggap telah runtuh oleh sebagian masyarakat. Akan tetapi, cara tersebut digantikan oleh Mao dengan mengubah ideologi Tiongkok menjadi komunis.

Tiongkok telah dikenal sebagai republik sosialis, dimana Sun Yan Set sebagai tokoh pengagas revolusi yang menginginkan Tiongkok terlepas dari sistem perbudakkan. Sun Yan Set juga memperkenalkan konsep *San Min Chu I* atau tiga asas demokrasi rakyat, di antaranya “*Min Tsen*” yang diartikan sebagai bangsa dan negara. “*Min Chu*” yang diartikan sebagai demokrasi dan “*Min Sheng*” yang diartikan penghidupan. Pemberontakan pada Dinasti Qing di tahun 1911 menjadikan Sistem Politik Tiongkok menjadi republik. Ketiga asas yang diperkenalkan oleh Sun Yan Set disebut sebagai sosialisme yang menitikberatkan pada kesejahteraan rakyat.

Pada awal abad ke-20 sebelum keruntuhan Dinasti Qing, Konfusianisme kembali muncul sebagai ideologi politik. Para pengikut Konfusianisme terpecah menjadi dua, yaitu kelompok skeptik terhadap Konfusianisme yang mengkritiknya melalui Gerakan Kebudayaan Baru (*New Culture Movement*) dan kelompok pro Konfusianisme yang beranggapan bahwa Konfusianisme dapat direformasi. Sehingga menjadi pelopor lahirnya Konfusianisme Baru. Meski kelompok skeptik terhadap Konfusianisme lebih mendominasi dengan Mao Zedong menjadi tokohnya dan beranggapan bahwa Konfusianisme sebagai ideologi yang meneksploitasi kelas dan bertentangan dengan Marxisme. Gerakan ini mencapai puncaknya saat Revolusi Kebudayaan (Miller, N.J, 2024).

Meski demikian, nilai-nilai ajaran Konfusianisme masih diterapkan di Tiongkok dalam konteks sosial-masyarakat. Dalam praktiknya, Tiongkok masih menerapkan prinsip-prinsip serta nilai-nilai Konfusianisme sebagai etika politik. Akan tetapi, secara legal-formal negara telah terikat oleh konstitusi yang telah dirancang atas dasar ideologi yang disepakati.

Tiongkok menjaga warisan nilai-nilai Konfusianisme dalam kehidupan sosial-kultural dan sosio-politik. Konfusianisme Baru di Tiongkok lebih dekat dengan konsep harmoni. Kosep yang diterapkan oleh institusi dalam menciptakan tatanan sosial. Harmoni menurut Konfusius merupakan bagian dari tatanan kosmik dalam kehidupan untuk mencapai tujuan damai. Dalam kebijakan Satu Tiongkok (*One China Policy*) sebagai sebuah ideologi-politik yang mencitakan harmoni dan persatuan. Tiongkok selalu berupaya dalam mempertahankan persatuannya dengan kebijakan tersebut dalam menyelesaikan konflik perpecahan.

b) Konfusianisme Baru sebagai gerakan politik

Konfusianisme Baru sebagai etika politik tidak hanya dilihat sebagai ideologi. Di samping itu juga sebagai pergerakan politik yang menetapkan tatanan sosio-politik untuk mencapai tujuan serta konsep ideal yang dicapai oleh masyarakat. Gerakan politik Konfusianisme Baru dapat dilihat melalui peranan aktif yang dilakukan oleh kaum intelektual reformis beserta dengan elit politik di dalamnya. Gerakan Konfusianisme Baru pada generasi keempat dengan tokohnya yaitu Jiang Qing, Sheng Hong, Kang Xiaoguang dan Chen Ming. Keempat tokoh tersebut menjadi dalang dalam perlehatan *Confucian Conference in Guiyang Yangming Academy* atau yang dikenal dengan *Summit Conservatism Conference* pada tahun 2004 (Riuchang Wang, 2011).

Studi-studi beserta kajian-kajian tentang filosofi Konfusianisme mulai digelorakan kembali pada kalangan kaum intelektual, khususnya di tingkat Perguruan Tinggi Tiongkok. Partai Komunis Tiongkok menyambutnya dengan tangan terbuka. Penyambutan tersebut ditandai dengan didirikannya *Confucius Institute* di 80 negara bagian, termasuk Indonesia. *Confucius Institute* bertujuan untuk menyerbarluaskan dan memperkenalkan bahasa, kebudayaan serta naskah-naskah kuno pada dunia. Bagi Partai Komunis Tiongkok hal ini bertujuan untuk menaikkan citranya pada masyarakat luas serta menjadi *soft power* dalam diplomasi Tiongkok. *Soft power* bermanfaat dalam menarik perhatian serta membentuk persepsi masyarakat secara luas terhadap Tiongkok yang berupaya mengedepankan moralitas dibandingkan dengan kekerasan (Miller, N.J, 2024). Penggunaan *soft power* dalam kebijakan politik luar negeri Tiongkok oleh Jiang Zemin sebagai representasi dari nilai Konfusianisme Baru.

Daniel Bell menyebutkan bahwa titik awal kebangkitan kembali Konfusianisme dan Budaya Tradisional Tiongkok yaitu melalui Konfusianisme Baru. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya para kaum cendekiawan dalam mendiskusikan 国学 (*guoxue*) atau studi nasional. Kajian-kajian mengenai Konfusianisme Baru terdapat di perguruan tinggi. Universitas-universitas ternama mengadakan kelas pembelajaran dan pelatihan nasional yang dihadiri oleh para pebisnis, pegawai negeri sipil dan anak-anak. Kelas anak-anak dijadikan berupa kelas cerita-cerita klasik dan literatur-literatur Konfusianisme yang digemari oleh banyak orang (Bell, D, 2024).

Gerakan politik di Tiongkok digelorakan oleh para kaum pelajar, cendekiawan dan beberapa tokoh politik sebagai pemeran dalam menguatkan posisi Konfusianisme Baru sebagai gerakan politik. Jiang Zemin merupakan Presiden Tiongkok pada periode 1993 hingga 2003 juga merupakan sosok pejabat Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (Stephen McDonell & Tessa Wong, 2024). secara eksplisit menegaskan tentang aturan hukum dan kebijakan harus berjalan beriringan. Hal tersebut merupakan fusi terhadap etika Konfusianisme Baru dengan aspek-aspek modern. Sehingga dapat melahirkan politik yang secara konsisten menjunjung nilai-nilai tradisional Tiongkok. Salah satu contoh dalam gerakan ini yang dipimpin oleh Jiang yaitu sistem ekonomi pasar sosialis.

Zhu Rongji merupakan seorang tokoh Politikus Tiongkok dan merupakan seorang pembaharu ekonomi terkemuka di Partai Komunis Tiongkok (anonim. Zhu Rongji, 2024). Zhu juga menjabat sebagai Perdana Menteri Tiongkok pada tahun 1998 hingga 2003 di bawah pimpinan Presiden Jiang. Pada tahun 2003 Zhu menyerukan kepada masyarakat Tiongkok tentang fusi antara aturan hukum (*rule of law*) dengan aturan kebijakan (*rule of virtue*) yang bersandar pada Konfusianisme Baru. Hal tersebut menjadi sangat penting dilakukan guna untuk membentuk keselarasan dan harmonisasi politik yang lebih kuat serta solid di dalam Partai Komunis Tiongkok serta menjadi pemimpin yang baik bagi rakyat Tiongkok.

Hu Jintao adalah seorang politikus Tiongkok yang mulai menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok pada 15 November 2002. Selanjutnya, Hu juga menjabat sebagai Presiden Tiongkok dari 15 Maret 2003 hingga 15 Maret 2013 (zczeapski, Kallie, 2024). Hu dikenal sebagai pelopor beberapa ide di dalam kepemimpinannya, di antaranya pembangunan damai, masyarakat yang harmonis dan pembangunan saintifik. Hu juga menggelar dialog mengenai kebijakan luar negeri “*harmonious rise*” yang argumentasinya berangkat dari implementasi ajaran konfusius dalam politik luar negerinya (Miller, N.J, 2024). Pergerakan politik ini telah merepresentasikan konsistensi Konfusianisme Baru sebagai pergerakan politik yang mengedepankan harmonisasi.

c) Konfusianisme Baru sebagai sistem politik

Konfusianisme Baru sebagai sistem politik merupakan bentuk nyata dari sebuah ideologi dan gerakan intelektual. Sistem digunakan untuk melihat serta mengetahui praktik-praktik dalam sebuah entitas politik di dalam negara secara utuh. Konsep sistem politik ini mencoba untuk memberikan penjelasan mengenai gejala politik dalam konteks tingkah laku elit maupun masyarakat sehingga menghasilkan kebijakan tertentu (Budiarjo, Miriam, 2003).

Dalam sistem politik, terdapat empat elemen penting yang saling berinteraksi, yaitu kekuasaan, kepentingan, kebijaksanaan dan budaya politik. Terkait dengan hal tersebut, bahasan mengenai partai politik sebagai salah satu lembaga dan kepemimpinan politik menjadikannya sebagai pusat untuk melihat sistem politik itu berjalan dalam sebuah negara. Prinsip-prinsip Konfusianisme Baru dalam kerangka politik Tiongkok merupakan cerminannya sebagai sistem politik, khususnya pada partai politik dan kepemimpinannya.

Pengaruh filosofi Konfusianisme secara tradisi dalam praktik politik dapat dilihat dari ciri-cirinya secara umum, yaitu demokrasi satu partai, perlindungan oposisi yang terbatas, kebebasan yudisial yang terbatas, konservatisme serta kebebasan berpendapat yang terbatas dan hubungan antara pemerintah dengan kelompok bisnis yang baik (John Eugene Ho, 1993). Meskipun tidak semua poin tersebut relevan dengan sistem politik di Tiongkok. Akan tetapi, beberapa poin-poin tersebut menjadi gambaran dalam kecenderungan sistem politik yang berlaku di Tiongkok.

Pola demokrasi satu partai yang cenderung menyandarkan demokrasi pada kerangka satu partai sebagai perwakilannya. Partai Komunis Tiongkok menjadi dominan perannya dalam mengendalikan proses dan sistem politik di Tiongkok. Meskipun terdapat setidaknya delapan partai dalam sistem politik tersebut, di antaranya *Revolutionary Committee of the Chinese Kuomintang, China Democratic League, China National Democratic Construction Association, China Association for Promoting Democracy, Chinese Peasants and Workers Democratic Party, China Zhi Gong Dang, Jiu San Society dan Taiwan Democratic Self-Government League* (*China.org.cn*, 2024).

Jiang Qing seorang kaum cendekiawan yang mengenalkan teori legitimasi politik tiga dimensi melalui pembentukan badan legislatif atau perwakilan rakyat trikamera Jiang berpendapat bahwa pandangan orang-orang modern terhadap politik sebagai sesuatu yang humanis, sekuler dan aktual atau bersifat kekinian. Etika Konfusianisme Baru juga memiliki sistem oposisi sebagai bentuk eksistensinya. Akan tetapi partai oposisi memiliki kesempatan yang dibatasi oleh penguasa.

Partai Komunis Tiongkok telah mendominasi dalam mengawali proses politik di Tiongkok. Dengan kata lain, partai tersebut memegang penuh kontrol dan kendali terhadap proses politik dan kekuasaan di Tiongkok. Kebijakan-kebijakan yang dicetuskan oleh Pemerintah Tiongkok, merupakan sebuah hasil dari proses pembuatan kebijakan internal yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok. Partai Komunis Tiongkok terdiri atas struktur hierarkis dan sentralistik. Kongres nasional partai digunakan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan politbiro sebagai pemegang penuh kontrol atas seluruh kebijakan partai. Sehingga menjadikan partai oposisi menjadi kurang berkembang.

KESIMPULAN

Dalam pembahasan pada tulisan ini telah mengkaji dan memberikan wawasan tentang landasan moral politik internasional Tiongkok, menjelaskan peran etika dalam membentuk perilaku politik internasional, yang dapat berimplikasi pada kepemimpinan politik dan pengambilan keputusan serta kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemahaman yang bermuansa tentang hubungan yang kompleks antara etika, politik, dan budaya di Tiongkok. Konfusianisme Baru merupakan representasi dari proses dialektika yang telah menjembatani dua kontradiksi antara konservatif tradisional dan klasik. Dari perpaduan keduanya, penerapan Konfusianisme Baru dalam memandang ideologi, gerakan, dan sistem politik internasional Tiongkok. Tiongkok dengan gerakan politik Konfusianisme Baru melalui upaya kelompok intelektual dan elit yang menekankan pentingnya membangun kembali karakteristiknya dan menegaskannya kepada masyarakat internasional melalui penggunaan *soft power*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan politik internasional Tiongkok setelah Perang Dingin atau pada masa kepemimpinan Presiden Jiang Zemin sesuai dengan nilai-nilai Konfusianisme Baru.

REFERENSI

- Afat. Ajaran Kebajikan Confucius Menyinari Hati Sanubari Manusia. 20 September 2024. <https://khonghucu.kemenag.go.id/jiangdao/ajaran-kebajikan-confucius-menyinari-hati-sanubari-manusia-mTyAK>.
- Anonim. Zhu Rongji. 5 November 2024. <https://www.britannica.com/biography/Zhu-Rongji>.
- Bell, Daniel. A. "China's leaders rediscover Confucianism". New York Times, 14 September 2006. <https://www.nytimes.com/2006/09/14/opinion/14iht-edbell.2807200.html>.
- Budiarjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia, 2003.
- China.org.cn. White Paper on Chinas's Political party system. 15 November 2007. <http://www.china.org.cn/english/news/231852.html>.
- Ho, John. Eugene. East Asian Philosophy: with Historical Background and Present Influence. New York: Peter Lang, 1992.
- Imron, M. Ali. Selayang Pandang Agama Koghuchu & Tao. Yogyakarta: Diva Press, 2023.
- Istiqomah, Citra. "KARAKTER POLITIK DI ASIA TIMUR DALAM TINJAUAN ETIKA KONFUSIUNISME BARU Studi Kasus: Perbandingan Politik di Cina, Jepang dan Korea Selatan dalam Tinjauan Etika Konfusiunisme Baru". Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Jacques, M. When China Rules the World: The End of the Western World and the Birth of a New Global Order. New York: The Penguin Press, 2009.
- Kalton, Michael. C. "Asian Religious Traditions and Natural Science: Potential, Present, and Future". International Conference on Science, Technology, and Asain Religions. (2002).
- Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah. Kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana Media, 2003.
- Kurth, J. First War of the Global Era: Kosovo and U.S. Grand Strategy. Dalam A. J. Bacevich, & E. A. Cohen (Eds.), War Over Kosovo: Politics and Strategy in a Global Age. New York: Columbia University Press, 2001.
- Medeiros, E. S. China's International Behavior: Activism, Opportunism, and Diversification. Santa Monica: RAND Corporation, 2009.
- Miller, Nicholas. J.S. Pragmatic Nationalism and Confucianism: The new Ideology of the CCP. 28 Januari 2011. <https://cesran.org/pragmatic-nationalism-and-confucianism-the-new-ideology-of-the-ccp.html>.
- Pradana, Muhammad Erza. "Politik Luar Negeri Tiongkok Sejak Tahun 1978: Transisi, Rebalancing dan Aktivisme". Hasanuddin Journal of International Affairs 2, No. 1 (February 2022).
- Qingguo, Jia. "Learning to Live with the Hegemon: evolution of China's policy toward the US since the end of the Cold War". Journal of Contemporary China, 14(44), (Agustus 2005): 395-407.
- Rivai, Aspin Nur Arifin. "Kebijakan Ekonomi Luar Negeri China dari Masa ke Masa dan Ambisi Internasionalisasi BUMN China di Tangan Xi Jinping". Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar 1, no. 1 (Desember 2022): 49-67.
- Rosyidin, M. Teori Hubungan Internasional: Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Sastrapradja, M. Pancasila sebagai Visi dan Referensi Kritik Sosial. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2001.
- Sou'yib, J. Agama-agama besar di Dunia. Jakarta: Pustaka al-husna, 1996.
- Stephen McDonell & Tessa Wong. "Jiang Zemin: Former Chinese Leader dies aged 96". BBC News, 30 November 2022. <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-63805991>.
- Suettinger, R. L. Beyond Tiananmen: The Politics of U.S.-China Relations, 1989- 2000. Washington, D.C: The Brookings Institution, 2003.
- Sulasman, Metodologi Penelitian Sejarah. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Szczepanski, Kallie. Biography Hu Jintao, Foremer General Secretary of China. 4 Januari 2020. <https://www.thoughtco.com/hu-jintao-195670>.
- Tanggok, Ikhsan. Mengenal Lebih Dekat AGAMA TAO. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2010.
- Wang, Riuchang. The Rise of Political Confucianism in Contemporary China. (Januari 2011): 34-45.
- Zhao, Suisheng A New Model of Big Power Relations? China-US strategic rivalry and balance of power in the Asia-Pacific. Journal of Contemporary China (2014): 377-397.

Zunus, M. Etika Moral Konfusius Membangun Pemerintahan dan Masyarakat Ideal. 10 April 2023. <https://kemenag.go.id/hikmah/etika-moral-konfusius-membangun-pemerintahan-dan-masyarakat-ideal-aUqwy>.